

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna diciptakan Tuhan. Manusia dibekali akal dan pikiran bahkan fisik yang sempurna sehingga memiliki kehidupan normal. Di antara kehidupan normal tersebut ada sebagian orang yang terlahir lebih 'khusus' yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental sehingga disebut dengan istilah orang dengan kecacatan. Istilah kecacatan terlalu sensitif bagi orang-orang yang mengalami keadaan tersebut, maka diperhaluslah dengan kata difabel.

Difabel merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris *Different Ability People* yang artinya orang yang berbeda kemampuan diperkenalkan. Menurut Jurnal Perempuan (Mencari Ruang Untuk Difabel : 18), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam *International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF)* merinci definisi kecacatan dalam tiga terminologi. Pertama adalah *impairment* yang diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Kedua adalah *disability* yang diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya

orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment* tersebut. Terakhir adalah *handicap* yang didefinisikan sebagai kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik, adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- b. Penyandang cacat mental, adalah kelainan mental dan / atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Penyandang cacat fisik dan mental, adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan fisik dan mental (Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, 2015 : 9).

Beberapa pengertian difabel di atas merujuk pada orang-orang yang memiliki keterbatasan atau ketidaknormalan tertentu berkaitan dengan fisik dan mental dimana kondisi tersebut membatasi ruang gerak untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sosial, penyandang disabilitas tidak lepas dari berbagai permasalahan sosial. Dilansir dalam Suara Pembaruan (2013),

Ketua Umum Penyandang Cacat Indonesia, Gufroni Sakaril mengatakan bahwa penyandang disabilitas masih mendapatkan diskriminasi dan belum bisa setara dengan non disabilitas. Beberapa masalah sosial antara lain belum terpenuhinya hak-hak disabilitas, fasilitas publik seperti transportasi, tempat beribadah, jalur pedestrian, dan pusat olahraga penyandang disabilitas masih menemui kesulitan.

Selain permasalahan di atas, penyandang disabilitas tidak terlepas dari *stereotype* dan perlakuan masyarakat pada umumnya. Masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas termasuk orang sakit yang butuh pertolongan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Keadaan yang terus berlanjut ini menimbulkan rasa tidak percaya diri sehingga penyandang disabilitas menutup diri dan jarang sekali bersosialisasi.

Terkait dengan permasalahan sosial ekonomi bagi penyandang disabilitas, Ada beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kehidupan mereka. Para penyandang disabilitas juga mendapatkan peluang kerja yang sama dengan masyarakat normal lainnya dimana penyandang disabilitas juga bisa menunjukan eksistensi mereka dengan keterampilan dan bakat yang mereka miliki. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Cipta Jaya, 2003 : 6) tentang ketenagakerjaan pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitaspun mendapat perhatian dalam ruang lingkup publik. Para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam instansi baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 53 ayat 1 dan 2 tentang pengharusan penyediaan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah dengan 2% dan instansi swasta 1% dari total jumlah seluruh pegawai.

Di Indonesia, jumlah orang dengan kecacatan (ODK) mencapai 9 juta jiwa. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2010 tercatat jumlah ODK mencapai 9.046.000 jiwa dari sekitar 237 juta jiwa. Artinya, sekitar 4,74 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas yang dibagi atas beberapa kategori penyandang cacat yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik-mental. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke 4 dari 33 provinsi di Indonesia berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 yaitu sekitar 3,76 persen penyandang disabilitas. Peringkat ini menunjukkan bahwa jumlah ODK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tinggi.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah ODK pada tahun 2013 sebesar 5.393 orang dan tahun 2015 sebesar 5.601 orang. Data ini

menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah ODK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kabupaten yang memiliki jumlah ODK tertinggi yaitu Kabupaten Bangka. Dari data di atas, jumlah ODK pada tahun 2013 sebesar 1.081 orang, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1.073 orang dimana jumlah tersebut banyak disebabkan oleh cacat fisik atau biasa disebut tuna daksa.

Berbicara masalah kesempatan kerja, di antara beberapa jenis kecacatan, penyandang tuna daksa lebih memungkinkan mendapat pekerjaan dibandingkan dengan penyandang disabilitas yang lain sebab penyandang tuna daksa masih dapat melakukan pekerjaan walaupun memiliki keterbatasan tertentu.

Di Kota Sungailiat sendiri, penyandang tuna daksa merupakan penyandang disabilitas yang memiliki mobilitas sosial cukup tinggi dibandingkan dengan penyandang disabilitas lainnya. Masih cukup banyak tuna daksa yang melakukan aktivitas keseharian seperti melakukan pekerjaan mulai dari menjadi tukang parkir bahkan berwirausaha. Ini membuktikan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan berupaya menggali potensi diri untuk mendapatkan kehidupan layak. Namun, pekerjaan yang mereka lakukan kebanyakan berada pada ranah lapangan dan mandiri. Padahal, penyandang tuna daksa juga memiliki hak bekerja ranah lain seperti di instansi dengan bekal latar belakang pendidikan yang cukup. Melihat keadaan demikian, seharusnya peluang penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Sungailiat semakin besar untuk memperoleh

pekerjaan layak dan tetap agar dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan kata lain, penyandang disabilitas tuna daksa tidak segan untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa keterbatasan yang dimiliki bukan penghalang untuk mereka bermobilitas sosial.

Dengan cukup banyaknya jumlah tuna daksa di Kota Sungailiat, maka permasalahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui pekerjaan yang pasti. Menjadi persoalan penting jika tuna daksa ingin hidup mandiri di tengah keterbatasan mereka tapi tidak mendapatkan dukungan padahal sudah ada regulasi yang mengatur. Masalah kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas khususnya tuna daksa belum menjadi persoalan yang diprioritaskan penyelesaiannya. Tanpa disadari, hal tersebut mengarah pada kekerasan yang tertuju pada tuna daksa. Bentuk kekerasan terjadi karena adanya spontanitas dari dalam diri pelaku yang telah terencana ataupun tidak sengaja. Menurut Johan Galtung (Susan, 2008 : 118-119), terdapat tiga dimensi kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Adapun bentuk kekerasan terhadap tuna daksa yang dikemukakan oleh Galtung seperti pemukulan, penyembunyian jati diri, pembatasan akses, dan diskriminasi hak tuna daksa. Namun pada penelitian ini kekerasan simbolik yang dikemukakan oleh Pierre Felix Bourdieu juga ikut menyertakan panjangnya ketidakadilan bagi penyandang tuna daksa.

Kekerasan simbolik bukan berupa kekerasan fisik atau semacamnya melainkan adanya sebuah pemaksaan sistem serta kondisi

sehingga penyandang tuna daksa menerima perlakuan yang ada sehingga terjadi sebuah proses pelanggaran bahwa keadaan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Gambaran ini membuat peneliti tertarik untuk menemukan kekerasan simbolik dan implikasinya terhadap peluang kerja bagi tuna daksa pada instansi di Kota Sungailiat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diambil, yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyandang tuna daksa dalam perekrutan peluang kerja pada ranah instansi di Kota Sungailiat ?
2. Bagaimana bentuk kekerasan simbolik yang terjadi terhadap penyandang tuna daksa dalam perekrutan peluang kerja pada ranah instansi di Kota Sungailiat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyandang tuna daksa dalam perekrutan peluang kerja pada ranah instansi di Kota Sungailiat.

2. Untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan simbolik yang terjadi terhadap penyandang tuna daksa dalam perekrutan peluang kerja pada ranah instansi di Kota Sungailiat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai penyandang disabilitas serta menjadi landasan untuk mengkaji seputar permasalahan disabilitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memperkaya sosiologi, yakni sosiologi difabel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau literatur selanjutnya bagi peneliti yang meneliti persoalan disabilitas dan menjadi masukan bagi para *stakeholder* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan, peneliti mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain dan dianggap memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas khususnya tuna daksa dalam pemenuhan kebutuhan mereka di ruang publik.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Meita Setyawati pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul “*Daya Juang Dalam Menghadapi Diskriminasi Kerja Pada Penyandang Tuna Daksa*”. Dalam penelitiannya, Meita mendeskripsikan tentang cara bertahannya kaum tuna daksa yang didasarkan semangat berjuang dalam bekerja baik. Penyandang tuna daksa dalam penelitian ini bekerja pada perseorangan seperti pertokoan, instansi pemerintah, dan instansi swasta. Tuna daksa yang bekerja di pertokoan pecah belah sering mendapatkan diskriminasi bukan dari bos subjek, melainkan para pelanggan yang kerap menolak dan memilih pekerja yang lain untuk membawakan barangnya karena takut barang yang dibelinya jatuh dan pecah. Dampak yang diterima dari diskriminasi ini adalah pengurangan pendapatan, karena biasanya dari membantu pelanggan membawakan barang tersebut subyek diberikan upah tambahan sebagai gantinya.

Tuna daksa selanjutnya mengalami cacat pada kakinya akibat kecelakaan. Sebelumnya subjek bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara, namun semenjak kejadian tersebut subjek sering mendapatkan diskriminasi dari atasannya di perusahaan hingga akhirnya subjek diberhentikan oleh perusahaan tempat subjek bekerja. Ketika menjadi seorang *cleaning service* pun tuna daksa mengalami diskriminasi oleh atasannya. Akan tetapi subjek tetap percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya dan terus menunjukkan kemampuannya sesuai dengan pekerjaannya saat ini.

Tuna daksa yang ketiga bekerja pada instansi pemerintah menjadi salah satu pegawai honorer. Diskriminasi yang kerap didapatkannya di kantor adalah tidak pernahnya subjek mendapatkan kegiatan dinas di luar kantor. Setiap kegiatan yang melibatkan perwakilan dari setiap instansi, subjek tidak pernah diturutsertakan pada kegiatan tersebut. Semua pekerjaannya selalu dilakukan oleh orang lain. Subjek merasa keterbatasan fisiknya membuat orang-orang di kantornya malu untuk membawa subjek melakukan perjalanan dinas dalam dan luar kota. Namun diskriminasi yang didapatnya itu tidak membuatnya putus asa, subjek tetap bekerja sesuai dengan kemampuan dan tugas yang dimilikinya di kantor.

Penelitian Meita mengungkapkan bahwa masih ada sebagian penyandang tuna daksa yang tetap bersemangat mengerahkan kemampuannya dan berhasil mendapatkan pekerjaan di tengah diskriminasi kerja yang selalu hadir dan membayangi para penyandang

tuna daksa ini. Kemampuan untuk terus mencoba hingga akhirnya diterima di suatu pekerjaan ini menunjukkan adanya sifat pantang menyerah dalam menggapai hal yang diinginkan. Daya juang yang dimiliki disebabkan oleh daya saing produktivitas, motivasi, dan berani mengambil resiko.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Retno Feriansyah (2014) dalam skripsi yang berjudul “ *Pembangunan Sensitif Disabilitas (Menakar Aksesibilitas Kaum Tuna Daksa di Kota Pangkalpinang terhadap Fasilitas Pelayanan Publik)*”. Penelitian tersebut, Retno mendeskripsikan tentang rancangan dan implementasi kebijakan yang memihak tuna daksa di Kota Pangkalpinang dan bagaimana penyediaan aksesibilitas yang memihak tuna daksa terkait penyediaan kebutuhan mereka di ruang publik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya evaluasi ulang terkait sumber daya manusia di pemerintahan mengenai pengetahuan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan disabilitas, lemahnya intervensi pemerintah terhadap SKPD yang menyebabkan tidak terimplementasikan kebijakan yang telah ada terkait kebutuhan disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas sebagai sarana dan prasarana di pelayanan publik, kurangnya koordinasi antarsistem terkait pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini diperuntukan bagi kalangan normal.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno (2014) menggambarkan masih minimnya aksesibilitas dan fasilitas publik khusus penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang sehingga diperlukan tindak tegas

pemerintah daerah untuk memenuhi apa yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas.

Penelitian *ketiga* yang dilakukan oleh Muhammad Riski dalam jurnal yang berjudul *Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas terhadap Pengguna Angkutan Umum di Kabupaten Sidoarjo*. Konstruksi sosial yang terbentuk di dalam penyandang disabilitas adalah konstruksi sosial yang negatif terhadap penggunaan angkutan umum khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan angkutan umum sendiri belum begitu maksimal dalam melayani para penumpang dan pemakai jasa angkutan umum di Sidoarjo. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum terus bertambah. Kenyamanan yang harusnya diperoleh masyarakat kini menjadi hal langka dalam perkembangan angkutan umum. Padahal, angkutan kota diharapkan menjadi sebuah jalan keluar di tengah kepadatan yang kini semakin merajalela. Kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh masyarakat kota juga sangat dirasakan bagi para penyandang disabilitas.

Dengan keterbatasan yang mereka miliki, angkutan umum diharapkan dapat menjadi alat penolong untuk mobilitas mereka. Namun, bukannya menjadi sebuah bantuan untuk membantu mobilitas, angkutan kota justru menjadi modal transportasi yang sulit untuk digunakan para penyandang disabilitas. Dengan fasilitas yang kurang memadai bagi penyandang disabilitas, angkutan kota kini bukan lagi menjadi opsi utama untuk mobilisasi bagi penyandang disabilitas. Di samping itu, pelayanan

yang buruk juga menjadi faktor penting dalam penggunaan angkutan kota. Belum lagi biaya akomodasi yang cukup tinggi.

Kini para penyandang disabilitas lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada harus menggunakan angkutan kota. Penyandang disabilitas pun memilih kendaraan pribadi yang mudah dijangkau dan efisien dalam penggunaannya pada saat ini. Mereka memilih untuk mengendarai sepeda motor. Dengan sedikit modifikasi yang dilakukan pada sepeda motor, mereka pun kini menjadi salah satu pengguna baru di jalan raya. Hal ini didukung dengan adanya SIM D yang dikeluarkan pada tahun 2011 yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. *Pertama*, penelitian sebelumnya dari Meita Setyawati (2016) meneliti tentang bagaimana daya juang tuna daksa dalam menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan yang mereka geluti sedangkan penelitian ini ingin mencari bentuk kekerasan simbolik yang diterima tuna daksa dalam memperoleh pekerjaan. *Kedua*, penelitian yang dilakukan Retno Feriansyah (2014) membahas tentang kondisi nyata pembangunan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang tuna daksa dalam ruang publik di Kota Pangkalpinang. *Ketiga*, yang dilakukan oleh Muhammad Riski menggambarkan pandangan penyandang disabilitas terhadap angkutan umum yang dinilai kurang ramah terhadap penyandang disabilitas di

Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas yang ada pada alat transportasi tersebut. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan tiga penelitian selanjutnya terletak pada gambaran kekerasan simbolik terhadap penyandang tuna daksa dalam memperoleh peluang kerja pada ranah instansi di Kota Sungailiat.

F. Kerangka Teoretis

Untuk menganalisis penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori kekerasan simbolik yang dikemukakan oleh Pierre Felix Bourdieu. Dengan adanya proses konstruksi sosial bagi penyandang tuna daksa tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat simbol-simbol yang ditujukan kepada penyandang tuna daksa.

Terkait akan kekerasan simbolik, Bourdieu menjelaskan umumnya akan terjadi dalam proses sosialisasi di kehidupan sehari-hari. Kekerasan simbolik merupakan pemaksaan kesewenang-wenangan budaya dimana kekerasan semacam itu implisit dalam hierarki bahasan dan cara penggunaan bahasa. Ini artinya adanya pemaksaan didasari oleh konstruksi budaya oleh masyarakat yang berujung pada pelabelan tertentu sehingga terdapat pengertian kekerasan yang berbentuk bahasa yang khas. Kekerasan simbolik berjalan dengan membiarkan berbagai representasi yang dominan, opini, dan sesuatu yang sudah dianggap benar dan alamiah yang ditanamkan dalam pemikiran seseorang (Lubis, 2014 : 125). Secara

terus-menerus kekerasan simbolik akan melekat pada diri individu atau kelompok yang sudah terbentuk suatu gambaran khas sebagai penyiri atau identitas. Kekerasan simbolik dapat disebabkan karena telah tertanam dalam institusi dan berpegang pada otoritas atau kekuasaan.

Dalam pemikirannya, Bourdieu mengonsepan beberapa skema yang melandaskan terjadinya kekerasan simbolik yaitu habitus, ranah, modal, domonasi simbolik, dan bahasa. Di antara skema tersebut, habitus, ranah, dan modal memiliki keterikatan yang sangat kuat. Adapun penjelasan skema pemikiran Bourdieu dalam kekerasan simbolik.

1. Habitus

Habitus bukanlah murni pemikiran yang berasal dari Bourdieu melainkan bahasa latin yang artinya kebiasaan. Menurut Bourdieu (Fashri, 2007 : 90), habitus merupakan sistem disposisi juga meliputi kecenderungan-kecenderungan ajeg yang berlangsung lama dan diterapkan di berbagai area yang berbeda. Ini artinya bahwa habitus merupakan suatu kebiasaan yang telah lama tertanam dan terkonstruksi secara tetap dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, habitus adalah struktur- struktur yang dibentuk dan struktur- struktur- struktur yang membentuk. Menurut Wirawan (2013), habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu pihak, habitus merupakan “struktur yang menyusun” dunia sosial. Di lain pihak, ia adalah “struktur yang tersusun” oleh dunia sosial. Sederhananya,

habitus dapat berperan sebagai sebuah struktur yang membentuk kehidupan sosial dan dipandang sebagai struktur yang dibentuk oleh kehidupan sosial.

2. Ranah

Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan (Fashri, 2007 : 95). Ranah tidak dapat dipisahkan dari ruang sosial sehingga sarat akan kekuasaan dari berbagai pihak yang mencari kekuatan dan posisi dalam kehidupan sosial.

3. Modal

Istilah modal digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Modal dibentuk untuk memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap orang dan merupakan pusat dari kekuatan dalam sebuah ranah atau area. Bourdieu menggolongkan modal dalam empat jenis yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolis (Fashri, 2007 : 98-99).

4. Dominasi Simbolik

Dominasi simbolik memuat kekuasaan simbolik sebagai bentuk kekuasaan yang dapat membuat orang mengenali dan

mempercayai, memperkuat dan mengubah pandangan mengenai dunia. Kekuasaan simbol bekerja melalui tata simbol tersebut. Dominasi simbol yang terkait dengan kekuasaan digunakan sebagai “alat” guna membuat individu, kelompok, atau masyarakat patuh melalui peran simbol tersebut.

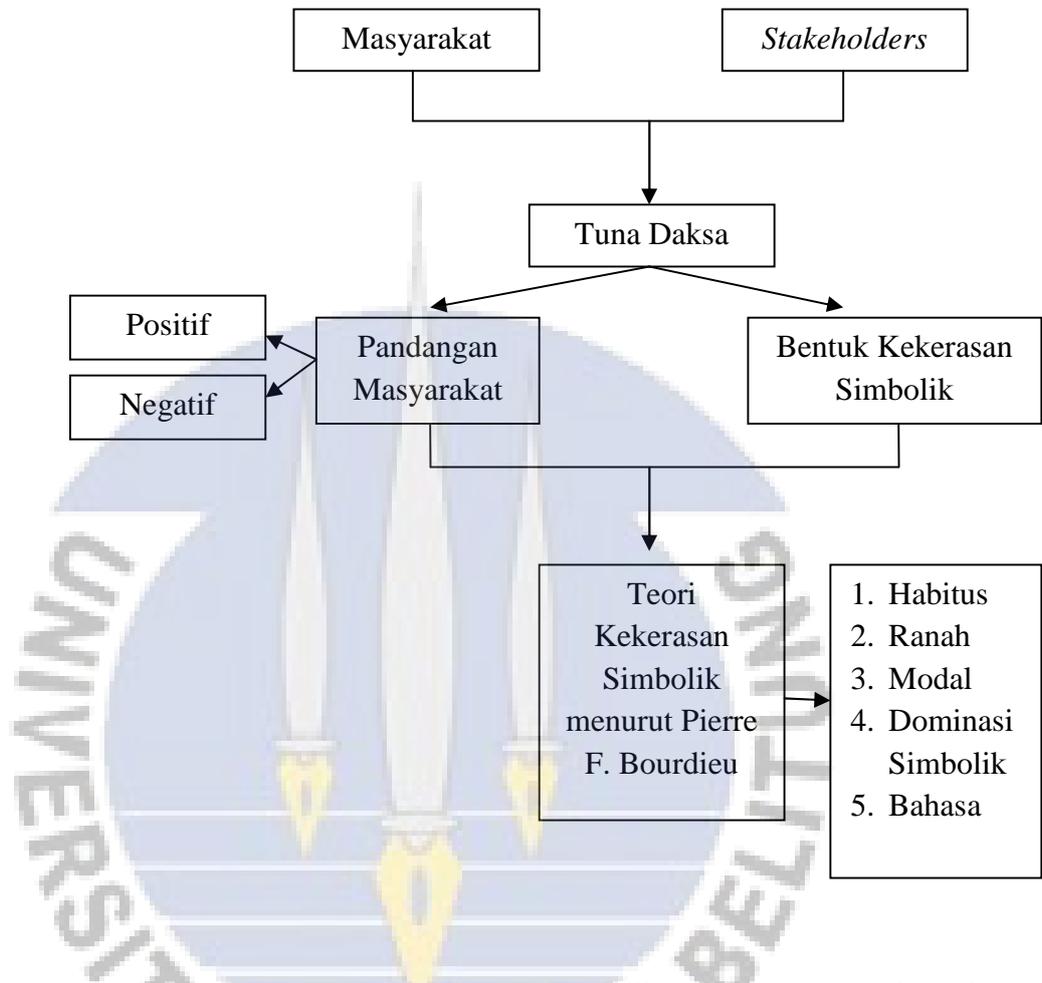
5. Bahasa

Bahasa dalam pemikiran Bourdieu memiliki arti yang luas. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi antarsesama yang digunakan untuk mendapatkan respon balik tetapi lebih ke arah suatu instrumen untuk meneguhkan suatu kepentingan tertentu. Ranah kekuasaan sarat akan penggunaan bahasa yang digunakan untuk memperkuat argumen, melawan, serta mempertahankan kuasa tersebut.

G. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini dibuat kerangka berpikir penelitian untuk mempermudah pengarah proses penelitian secara benar. Adapun kerangka berpikir yang telah dirumuskan, yaitu :

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian



Penyandang tuna daksa di Kota Sungailiat yang umumnya bekerja hanya pada ranah mandiri seperti pencukur rambut, penjahit, dan sebagainya. Tidak sedikit dari penyandang tuna daksa tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang cukup sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja pada ranah instansi baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53 ayat 1 dan 2 tentang pengharusan penyediaan temaga kerja khusus disabilitas dalam ranah instansi. Namun, hal itu belum bisa terealisasi walaupun

sudah ada payung hukumnya. Dalam peluang kerja tersebut tanpa disadari penghambatan untuk mendapatkan pekerjaan tetap merupakan kekerasan simbolik bagi penyandang tuna daksa sendiri.

Kekerasan simbolik terjadi melalui beberapa alur, yaitu dominasi simbolik, bahasa, habitus, arena, dan modal. Alur tersebut memiliki keterkaitan kuat dalam melanggengkan relasi kekuasaan berbagai elemen. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan simbolik tersebut, peneliti menggunakan konsep kekerasan simbolik dari Pierre Felix Bourdieu. Dengan adanya bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang didapat oleh penyandang tuna daksa memiliki keterkaitan mengenai dampak lanjutan terhadap peluang kerja bagi mereka pada ranah instansi di Kota Sungailiat.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diawali dengan studi literatur yang terkait dengan permasalahan disabilitas, baik itu penelitian sebelumnya atau wacana terkait. Selain itu, dilakukan diskusi dan pra observasi untuk melengkapi gambaran penyandang tuna daksa dalam penulisan untuk memperkuat argumen peneliti.

Pada bab pertama menjelaskan beberapa tahap yang akan dijelaskan. Pertama, latar belakang adalah alasan peneliti ingin meneliti masalah atau objek penelitiannya. Sesuai dengan topik yang akan diteliti,

maka latar belakang peneliti dalam penelitian ini tertarik meneliti masalah kekerasan simbolik terhadap peluang kerja tuna daksa pada ranah instansi di Kota Sungailiat. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan diteliti. Lalu, tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kemudian, terdapat pula manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tahap selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang merupakan literatur penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Tahap selanjutnya yaitu kerangka teoritis dimana tahap ini merupakan alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Tahapan terakhir yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dibuat untuk memudahkan peneliti untuk mengurutkan alur pikir penelitian.

Bab selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini akan diambil di Kota Sungailiat dengan objek penelitian tentang peluang kerja bagi penyandang tuna daksa di instansi pemerintah dan instansi swasta. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tak terstruktur sebagai data utama data serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Pada bab berikutnya mengenai gambaran umum objek penelitian. Dalam gambaran umum, penelitian ini memberikan gambaran berupa data wilayah administrasi dan demografi Kabupaten Bangka, gambaran umum penyandang tuna daksa di Kota Sungailiat, dan persyaratan perekrutan pegawai baik instansi pemerintah maupun instansi swasta yang telah dipilih.

Kemudian, bab selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan atau menganalisis proses kekerasan simbolik kepada tuna daksa dalam mencari peluang pekerjaan pada ranah instansi di Kota Sungailiat.

Bab terakhir yaitu penutup dibagi atas dua tahap yaitu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan saran yang berupa rekomendasi- rekomendasi bagi berbagai pihak terkait permasalahan disabilitas.